

Dana APBN untuk IKN Turun Rp40,2 T

Pembangunan Kompleks Legislatif dan Yudikatif Ulang, Beri *Deadline* Pengusaha yang Sudah *Groundbreaking* tapi Belum Membangun

BALIKPAPAN - Presiden Prabowo Subianto memastikan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim berlanjut. Prabowo bahkan telah menyetujui alokasi APBN sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan tahap II yang dimulai tahun ini sampai 2029.

“Sudah di-*approve* anggaran IKN Rp48,8 triliun untuk lima tahun ke depan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemendagri) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sesuai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).

Dana tersebut akan difokuskan untuk melengkapi infrastruktur pemerintahan. Khususnya untuk kawasan legislatif dan yudikatif. AHY melanjutkan, dari rancangan awal pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif yang sudah disusun pemerintah, akan dilakukan *review* atau ditinjau kembali. “Tugas saya sebagai Menko di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ingin meyakinkan agar segala sesuatunya terintegrasi dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, jika dibandingkan tahap I, APBN untuk pembangunan tahap II mengalami penurunan. Pada tahap I, alokasi yang dikucurkan APBN mencapai Rp89 triliun. Ada penurunan Rp40,2 triliun. Padahal, periode tahap I hanya tiga tahun. Yakni, 2022 sampai 2024. Meski demikian, Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono menepis bahwa komitmen pemerintah berkurang. Menurut dia, angka Rp48,8 triliun sudah proporsional sesuai kebutuhan. “Buat kami cukup, sesuai rencana kami,” ujarnya.

Apalagi, pembangunan IKN juga tidak sepenuhnya didanai APBN. Ada skema investasi maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Hingga saat ini, komitmen pembangunan melalui KPBU juga sudah mencapai Rp60 triliun. Di antaranya untuk pembangunan 97 tower apartemen, 129 rumah tapak, dan jalan. Angka itu diyakini terus bertambah.

“Kemudian juga, 6 proyek KPBU lagi untuk pembangunan jalan dan *multi utility tunnel* sepanjang 138,6 kilometer di KIPP yang selama ini dikerjakan baru sebagian, ini akan kami lanjutkan yang baru dengan KPBU. Dan satu KPBU lagi untuk pembangkit listrik tenaga surya yang sekarang sudah 50 MW. Kemarin sudah diresmikan Bapak Presiden,” ungkapnya. Terkait progres pembangunan IKN, Basuki menerangkan cukup baik. Tahap I sudah mencapai 97 persen. Tahap II juga sudah dimulai sebagian.

Dalam waktu dekat ada *groundbreaking* (peletakan batu pertama pembangunan konstruksi) yang ke-9 di IKN. Momen itu akan menandai dimulainya pembangunan enam proyek. “Ada enam. Hotel, perkantoran, dan restoran. Sudah akan masuk,” ujarnya. Total investasi pada *groundbreaking* ke-9 tersebut mencapai Rp6,5 triliun. Untuk pelaksanaannya, Basuki menyebut masih menunggu kesediaan waktu Presiden Prabowo. Menurut dia, sudah banyak infrastruktur di IKN yang menunggu peresmian dan *groundbreaking*. “Pak Menteri PU sudah mengirim surat untuk peresmian. Saya sudah

mengirim surat untuk *groundbreaking*. Jadi, mudah-mudahan beliau bisa menjadwalkan waktunya,” tuturnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menambahkan, pihaknya juga telah menuntaskan sejumlah hunian di IKN. Antara lain, 27 tower untuk ASN hingga rumah jabatan menteri. Terkait *groundbreaking*, politikus Partai Gerindra ini menyampaikan, Presiden Prabowo lebih senang melakukan peresmian proyek, ketimbang melakukan kegiatan seremonial berupa peletakan batu pertama atau *groundbreaking*.

Pria yang akrab disapa Ara ini menambahkan, dalam Rapat Terbatas terkait IKN di Istana Kepresidenan, dilakukan diskusi panjang mengenai bagaimana peranan swasta. Pasalnya, sudah banyak investor swasta yang melakukan *groundbreaking*, tetapi yang baru membangun sedikit. “Tadi saya diskusikan Pak Basuki (Kepala Otorita IKN), setuju *di-review* yang sudah *groundbreaking*. Pengusaha yang memang sudah *groundbreaking* tapi memang mungkin tidak jadi membangun atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik. Apakah mau lanjut apa tidak. Nanti diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya,” katanya.

Dengan begitu, sambung dia, menjadi peringatan bagi para pengusaha untuk bergerak cepat melakukan pembangunan. “Saya rasa itu harus dikasih *deadline*-nya waktunya kapan. Kalau enggak ada, ya sudah berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama. Sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu *deadline*-nya,” ungkapnya. ([far/c7/oni/jpg/kip/riz](#))

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Dana APBN untuk IKN Turun Rp40,2 T, 22/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU 3/2022), Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan ibu kota negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan undang-undang ini.
2. Dalam Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Alokasi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. berpedoman pada Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;

- b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai ibu kota negara untuk pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Ibu Kota Nusantara;
- d. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah.